



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

Tahun Sidang : 2009 - 2010
Masa Sidang : II
Rapat : Ke – 16 (enam belas)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/Tanggal : Selasa, 9 Februari 2010
Sifat : Terbuka
Pukul : 10.00 WIB s.d 12.20 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara : Membahas Laporan Keuangan Negara TA 2008 semua Mitra Kerja Komisi V DPR RI
Ketua Rapat : Drs. Yoseph Umarhadi, Msi, MA
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota : dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dan Kepala BPLS serta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pukul 10.00 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda rapat kerja hari ini adalah membahas laporan keuangan negara Tahun Anggaran (TA) 2008 dari semua Mitra Kerja Komisi V DPR RI.
3. Ketua mempersilakan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Kepala BMKG, Kepala Badan SAR Nasional, dan Kepala BPLS, untuk menyampaikan paparannya.
4. Ketua mempersilakan anggota Komisi V untuk menyampaikan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI memahami Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2008 Departemen Pekerjaan Umum dan mendesak untuk melakukan langkah perbaikan dengan :
 - a. Peningkatan kualitas SDM di bidang pelaporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI),
 - b. Penyempurnaan sistem dan prosedur, dan
 - c. Pembuatan rencana aksi (action plan),agar hasil penilaian BPK tahun – tahun berikutnya dapat lebih baik dari TA 2008.

2. Terkait dengan indikasi ketidakpatuhan pada Satker Tugas Pembantuan (SKPD-TP) yang tidak menyampaikan laporan keuangan dan tidak menyampaikan laporan Barang Milik Negara (BMN), sebagai salah satu penyebab *Disclaimer*, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan langkah perbaikan pada mekanisme SKPD-TP.
3. Komisi V DPR RI memahami dan mendesak kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan tindak lanjut atas berbagai temuan yang ada. Selanjutnya komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan peningkatan opini penilaian dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun - tahun berikutnya.
4. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi pada Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) atas Pemberian Opini 'Wajar Tanpa Pengecualian' (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2008. Selanjutnya Komisi V DPR meminta untuk mempertahankannya pada Tahun Anggaran berikutnya dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitasnya.
5. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal untuk meningkatkan opini penilaian pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2009, dari Opini WDP menjadi WTP dengan langkah-langkah yang direkomendasikan BPK RI.
6. Komisi V DPR RI mendesak kepada BPLS untuk meningkatkan opini penilaian pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2009 dari Opini WDP menjadi WTP dengan langkah-langkah yang direkomendasikan BPK RI.
7. Komisi V DPR RI dapat memahami Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Pusat dari Mitra Kerja Komisi V DPR RI dengan sejumlah catatan dan rekomendasi sesuai dengan poin-poin tersebut diatas serta berbagai hal yang akan disampaikan kemudian.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.20 WIB.

Jakarta, 9 Februari 2010

KETUA RAPAT,

TTD

DRS. YOSEPH UMARHADI, MSI, MA

